



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIANSYAH**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **457681**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.027.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 473 m2/400 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 447.300.000
2. Tanah Seluas 1.178 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. Tanah Seluas 590 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 118.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU SIGRA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA V1J02O32L0 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOTOR, YAMAHA CB Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 166.400.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 500.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 7.500.000**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 1.819.200.000

III. HUTANG

Rp. 59.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.760.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.